

PERJANJIAN INDONESIA RUSIA KERJASAMA BILATERAL EKONOMI DAN TEKNIK

Zailani Lubis

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Email: jailanilubis4@gmail.com

Natasya

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Email: n728501@gmail.com

Tamaulina Br. Sembiring

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Email: tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id
Korespondensi penulis : jailanilubis4@gmail.com

Abstract: *This article discusses the cooperation agreement between Indonesia and the Russian Federation regarding Economic and Technical Cooperation on March 12, 1999. The research article aims to explore the process of establishing this cooperation, the background of the cooperation. The relationship between Indonesia and Russia began not just as a business relationship between two countries but as a close friendship akin to two brothers that has lasted for 77 years since 1945. On January 25, 1950, the Soviet Foreign Minister A. Vyshinsky formally recognized Indonesia's independence and sovereignty in a written communication to Indonesia's Prime Minister/Foreign Minister M. Hatta, expressing the Soviet Union's desire to establish diplomatic relations. This article was written as an assignment for International Law studies to achieve academic credit.*

Keywords: *Technical, Economic, Bilateral, Cooperation, Agreement*

Abstrak: Artikel ini membahas tentang perjanjian kerjasama antara Indonesia dan Federasi Rumusa mengenai kerjasama Ekonomi dan Teknik 12 Maret 1999. Artikel penelitian ini mencoba untuk membahas bagaimana proses terjalannya kerjasama, Latar belakang terjadinya kerjasama tersebut. Berawal hubungan Indonesia dengan Rusia bukan hanya relasi bisnis antara dua negara melainkan persahabatan erat layaknya dua bersaudara yang telah lama berlangsung selama 77 tahun sejak 1945. Tanggal 25 Januari 1950 Menteri Luar Negeri Uni Soviet A. Vyshinky menyampaikan secara tertulis kepada Perdana Menteri / Menteri Luar Negeri RI M. Hatta bahwa Uni Soviet mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia dan berkeinginan menjalin hubungan diplomatik. Artikel ini ditulis sebagai tugas kuliah Hukum Internasional untuk mendapatkan nilai.
Kata Kunci : Perjanjian, Kerjasama, Bilateral, Ekonomi, Teknik.

PENDAHULUAN

Melihat fenomena hubungan internasional saat ini, perkembangan kehidupan antar bangsa tidak bisa lepas dari dinamika globalisasi di berbagai bidang. Aspek ekonomi saat ini berkembang pesat, terutama karena perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi, dan jaringan internasional memegang peranan yang paling penting. (Dano, 2023) Mirip dengan situasi saat ini, hal ini telah menciptakan rasa saling ketergantungan ekonomi antara satu negara dengan pembangunan dan kehidupan ekonomi negara lain.

Diplomasi ekonomi berperan penting dalam meningkatkan pendapatan suatu negara dan mampu bersaing di era globalisasi saat ini. (Juliet Kaarbo, 2020) Indonesia sendiri bersaing ketat dengan negara-negara blok Barat dan Timur dan mempunyai pengaruh signifikan terhadap proses pengambilan kebijakan internasional. Ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari diplomasi ekonomi. (Mas'oeed, 2020) Rusia merupakan salah satu negara terbesar di dunia dan telah menjadi mitra kerja sama

dengan Indonesia selama bertahun-tahun, dan fokus kerja sama di bidang ekonomi. Rusia merupakan negara maju yang tergabung dalam G8 (Kelompok 8 negara maju). (Arry Bainus, 2018)

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) Meningkatkan volume perdagangan bilateral dengan mengurangi hambatan perdagangan dan memperkuat kerja sama di sektor sektor strategis. (2) Menyelaraskan regulasi dan kebijakan antara dua negara untuk memfasilitasi kerja sama ekonomi dan teknik, serta menciptakan sinergi yang lebih baik dalam pelaksanaan proyek-proyek bilateral. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, kerja sama ekonomi bilateral merupakan bidang yang penting untuk dipertahankan dan ditingkatkan guna memperkuat perekonomian nasional, khususnya di bidang industri perdagangan dan investasi.

KAJIAN TEORITIS

Sejarah Kerjasama Indonesia-Uni Republik Sosialis Soviet 1945-1965

Hubungan kerjasama Indonesia Rusia telah mengalami pasang surut. Sejak awal kemerdekaan Indonesia telah mendapatkan bantuan dari Rusia. Bantuan yang diberikan tidak dapat dikatakan sederhana, berbagai bantuan mulai dari pengakuan dalam dunia Internasional hingga bantuan dana dalam meningkatkan kemampuan militer sehingga Indonesia menjadi negara yang disegani di kawasan Asia Pasifik. (Emanuel Sani de Ornay, 2022) Kedekatan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Uni Soviet telah dijalin sejak Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya pada tahun 1945. Kedekatan antara Indonesia-Uni Soviet mulai membuka pintu hubungan kerjasama antara kedua negara, hal ini merupakan suatu hal yang menguntungkan bagi Indonesia pada saat itu sedang berjuang setelah merdeka. (Hutabarat, 2022) Rusia pada saat itu bernama Uni Soviet merupakan negara yang memberikan dukungan kepada Indonesia untuk menjadi bagian dari anggota PBB. (Emanuel Sani de Ornay, 2022)

Hubungan erat antara Indonesia dan Rusia tetap terjalin hingga hubungan diplomatik terjalin pada Februari 1950. Sebelumnya, pada 19 Desember 1949, diadakan pertemuan 19 negara Asia di New Delhi, dan delegasi Soviet mengajukan permintaan kepada Dewan Keamanan PBB kepada Belanda untuk membebaskan wilayah yang berada di bawah kendali Indonesia dan menuntut agar hal itu dilaksanakan diberikan pengakuan kedaulatan segera dan penuh kepada Indonesia sebelum tanggal 1 Januari 1950; Di bawah tekanan, pemerintah Belanda terpaksa datang ke meja perundingan dengan perwakilan Indonesia, namun perundingan antara pemerintah Indonesia dan Belanda di Den Haag pada bulan Agustus 1949 gagal. (Maiwan, 2018)

Setelah kegagalan perundingan di Den Haag, perundingan kembali diadakan di Dewan Keamanan PBB. Perjanjian Meja Bundar yang ditandatangani di Den Haag menandai berakhirnya konflik antara Indonesia dan Belanda. Alhasil, pada tanggal 27 Desember 1949, diadakan upacara resmi pengakuan kedaulatan penuh Republik Indonesia Serikat atas seluruh Hindia Belanda, kecuali Nugini Belanda (Irlandia Barat), dengan pengakuan penuh. Indonesia akan menghormati kedaulatan Republik Amerika Serikat dan dinyatakan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Menjalin hubungan diplomatik antara Indonesia dan Uni Soviet memiliki kelebihan dan kekurangan di Indonesia, dan membuka kedutaan besar di Indonesia bukanlah hal yang mudah. 9 Februari 1953, Wakil Ketua Panitia Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat O.Rondonu (Kelompok Nasionalis), Wakil D.Gondokusmo (Partai Rakyat Nasional), Asraluddin (Partai Buruh), Joko Prawiro (Partai Indonesia Raya), dan M.Ntimiharjo (Partai Murba) mengusulkan agar Dewan membahas rancangan resolusi mengenai pertukaran segera misi diplomatik dengan Uni Soviet. Mereka yang mendukung pembukaan kedutaan besar Soviet meyakini bahwa pertukaran diplomatik dengan Uni Soviet merupakan tanda bahwa politik luar negeri Indonesia didasarkan pada hubungan yang netral dan terbuka dengan semua pihak di dunia internasional. (Muhammad Afdhal, 2020)

Pembukaan kedutaan besar Soviet di Indonesia memiliki keuntungan yaitu semakin besarnya peluang pertukaran sumber daya alam dari Indonesia, seperti karet untuk peralatan industri. Sebaliknya, mereka yang menolak menilai pembukaan kedutaan Soviet di Indonesia bisa membuka peluang terulangnya peristiwa Madiun tahun 1948. Kunjungan pertama Presiden Sukarno ke Uni Soviet juga menandai dimulainya kerja sama bilateral kedua negara. Uni Soviet juga menjanjikan pinjaman jangka panjang kepada Indonesia, dan Indonesia akan menyediakan bahan mentah dan barang lainnya kepada Uni Soviet. (Orhan, 2022)

Meski terdapat perbedaan ideologi dan ketegangan saat ini, Sukarno tidak tergoyahkan keyakinannya untuk menjalin kerja sama dengan Uni Soviet. Seusai kunjungannya ke Moskow, majalah-majalah besar internasional seperti Time, Newsweek, dan Life meliput berita terkait kunjungan Presiden Sukarno. (Maiwan, 2018) Berita tersebut membahas kedekatan yang “mencurigakan” antara pemerintah Indonesia dan Uni Soviet. Setelah kunjungan pada tahun 1957-1958 ini, tidak terlihat adanya keadaan yang dapat mempererat hubungan antara Indonesia dan Uni Soviet. Pada tahun 1962 hingga 1964, Indonesia yang masih berperang di sebelah barat Irlandia didukung oleh Uni Soviet. (Muhammad Afdhal, 2020)

Pada tahun 1962, Uni Soviet mendukung perjuangan Indonesia untuk Belanda dan memberikan bantuan rahasia untuk melawan dominasi AS di wilayah tersebut. Angkatan Laut Soviet mengirimkan enam kapal selam ke pangkalan Surabaya. Kapal selam tersebut kemudian dialihkan ke Bitun untuk membantu pembebasan Irian Barat. Bantuan kepada Indonesia menimbulkan perlawanan yang cukup besar dari Belanda. Indonesia dipandang tidak hanya sebagai sahabat Uni Soviet, tetapi juga sebagai negara potensial yang dapat membentuk aliansi untuk memperkuat dan memukul mundur Amerika Serikat di kawasan Asia-Pasifik. Selain itu, kedekatan kedua negara juga membawa keuntungan bagi Indonesia dan Uni Soviet. (Wasis Susetio, 2020)

Pada masa Orde Baru, Indonesia mulai memberikan sinyal positif kepada negara-negara Barat yang dipandang sebagai solusi bagi pembangunan negara yang baru merdeka. Pasca peristiwa tahun 1965, situasi berbeda muncul ketika Indonesia menjalin kerja sama yang erat dengan Uni Soviet pada era Presiden Sukarno. Pada masa Presiden Soeharto, Indonesia lebih memilih menjalin kerja sama pertahanan dengan negara-negara Barat. (Arry Bainus, 2018)

Sejarah Kerjasama Indonesia-Uni Republik Sosialis Soviet 1966-1999

Pada tahun 1966 hingga 1999, hubungan Indonesia dan Uni Soviet memburuk akibat peristiwa G30S/PKI. Memburuknya hubungan ini menyebabkan pasokan senjata Indonesia, yang masih bergantung pada Uni Soviet, harus mencari kerja sama baru untuk memenuhi kebutuhan senjatanya. Melihat situasi tersebut, Indonesia mencari opsi lain untuk memenuhi kebutuhan persenjataannya dan memilih bekerja sama dengan negara-negara Barat seperti Amerika Serikat, Perancis, dan Inggris yang lebih unggul di bidang alutsista. Kerjasama dengan negara-negara Barat diharapkan dapat memberikan peluang untuk memperoleh senjata yang sebanding dengan yang dikirim oleh Uni Soviet.

Selama tiga dekade, Indonesia tidak pernah menjalin hubungan kerja sama dengan Uni Soviet dan tetap bergantung pada pasokan alutsista dari Barat. Berakhirnya Perang Dingin menjadi pertanda bahwa situasi politik antara Barat dan Timur mulai mereda. Kita juga menyaksikan runtuhnya Uni Soviet. Mencairnya situasi politik mulai mempengaruhi hubungan Indonesia dan Uni Soviet. Pada tanggal 28 Desember 1991, ketika Soeharto melakukan kunjungan kenegaraan pertamanya ke Uni Soviet setelah terpilih sebagai presiden dan bertemu dengan Mikhail Gorbachev, Indonesia secara resmi mengakui Federasi Rusia sebagai negara penerus Uni Soviet. Kebijakan ini mulai memperbaiki hubungan yang terputus antara Indonesia dan Rusia.

Pada Mei 1998 turunnya pemerintahan Soeharto yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden B.J. Habibie juga sedikit membuat arah kebijakan luar negeri Indonesian berubah. Jika pada masa Soeharto kebijakan luar negeri Indonesia lebih dominan untuk berupaya mendekati diri dengan negara-negara yang perekonomiannya sudah maju untuk mendapatkan utang luar negeri, di era Habibie kebijakan luar negeri Indonesia terfokus pada penyelesaian masalah yang terjadi di Timor Timur. Pada masa Presiden Habibie yang singkat ini sempat menerima kunjungan Menlu Rusia, Yuri Maslyukov di Jakarta pada bulan Maret 1999. (Dano, 2023)

Dalam kunjungan Menlu Rusia tersebut ditandatangani persetujuan perdagangan, persetujuan kerjasama teknik dan ekonomi, dan persetujuan penghindaran pajak berganda.²⁷ Perpindahan kekuasaan sejak B.J. Habibie digantikan oleh Abdurrahman Wahid ditahun 1999 tidak membuat signifikan hubungan kerjasama antara Indonesia-Rusia. Presiden Abdurrahman Wahid sempat mengadakan pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin sewaktu menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Millenium PPB di New York tanggal 7 September 2000. Namun tidak ada pembicaraan yang menjurus pada peningkatan hubungan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Rusia. (Muhammad Afdhal, 2020)

Sejarah Kerjasama Indonesia-Rusia 2000-2009

Pada masa Megawati, terlihat politik Indonesia mulai kembali mendekati Rusia. Hal ini terlihat pada kunjungan resmi Megawati ke Rusia pada April 2003. Dalam kunjungan ini, Indonesia dan Rusia sepakat untuk menandatangani Deklarasi Hubungan Persahabatan dan Kemitraan antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia pada Abad ke-21. Pernyataan itu juga menyebutkan sejumlah perjanjian, termasuk kerja sama di bidang teknologi militer, perbankan, dan teknologi luar angkasa. Selanjutnya, kedua negara sedang mempersiapkan kerja sama nuklir untuk tujuan damai.

Pada saat ini, Presiden Megawati juga membeli dua buah pesawat Sukhoi Su-27SK, dua buah pesawat tempur Sukhoi Su-30MK, dan dua buah helikopter serang MI-35 dengan sistem pendapatan perdagangan seperti minyak mentah kelapa sawit dan karet, dengan total pendapatan perdagangan sekitar mencapai dolar AS.\$175 juta. Pembelian ini muncul dari kebutuhan untuk memodernisasi alutsista Indonesia yang terkena embargo senjata oleh Amerika Serikat karena dianggap sebagai aktivis hak asasi manusia. (Juliet Kaarbo, 2020)

Upaya Presiden Megawati dalam membangun kerja sama antara Indonesia dan Rusia dinilai berhasil dan memberikan landasan bagi pengembangan kerja sama militer-teknis sehingga Indonesia dapat menggunakan kekuatan militer dan keamanannya untuk mempertahankan diri. Suksesi pemerintahan Megawati ke Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan melemahkan kerja sama yang sudah ada. Selama kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Rusia pada bulan November 2006, ia juga menandatangani nota kesepahaman mengenai kerja sama antara kedua pemerintah dalam memerangi terorisme. Rusia juga setuju untuk menjual senjata dan alutsista ke Indonesia. (Hutabarat, 2022)

Selain itu, Rusia memberikan pinjaman pemerintah sebesar \$1 miliar antara tahun 2006 dan 2009 untuk pengadaan senjata Indonesia. Pinjaman ini akan diberikan Kementerian Pertahanan RI untuk memperkuat kemampuan pertahanan negara dan pengadaan 10 unit helikopter MI-17 V5 dan 5 unit helikopter MI-35P beserta persenjataannya untuk keperluan helikopter tempur dan transportasi TNI AD. TNI Angkatan Laut dilengkapi dengan dua kapal selam kelas Kilo dan 20 kendaraan infanteri tempur BMP-3F, sedangkan TNI AU diprioritaskan untuk dilengkapi satu skuadron tempur Sukhoi yang terdiri dari tiga Sukhoi SU-27 dan tiga Sukhoi SU30. (Emanuel Sani de Ornay, 2022)

Setahun setelah kunjungan SBY ke Rusia, giliran Presiden Vladimir Putin yang mengunjungi Indonesia pada September 2007.

Dalam kunjungannya, Presiden Putin memberikan kesempatan untuk mempererat kerja sama dan dukungan terhadap kemajuan ekonomi dan politik kedua negara yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Rusia memberikan peluang yang baik untuk membangun militer Indonesia yang membutuhkan peningkatan alutsista untuk mempertahankan kedaulatannya. Pada tanggal 22 Februari 2013, berdasarkan kontrak yang ditandatangani antara JSC "Rosoboron Ekspor" dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dua pesawat dan peralatan Sukhoi SU-30MK2 pertama dikirim ke Pangkalan Udara Indonesia Hasanuddin (Sulawesi Selatan). Negara diserahkan kepada Makassar (Provinsi Makassar). Pada Desember 2012, para ahli Rusia sudah mulai merakit pesawat tersebut.

Pengiriman pesawat Sukhoi kedua dan ketiga berdasarkan kontrak diharapkan selesai pada Juli 2013.

JSC "Ekspor Rosoboron". Ini adalah bagian dari perusahaan negara "Rostekhnologii" dan merupakan satu-satunya perantara berlisensi di Federasi Rusia untuk impor dan ekspor produksi, jasa dan teknologi pertahanan dan multiguna.

Pada tanggal 25 September 2013, upacara serah terima resmi dua buah jet tempur SU-30MK2 buatan Rusia kepada TNI AU dilaksanakan oleh Duta Besar Federasi Rusia di Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin di Makassar, Sulawesi Selatan. Mikhail Y. Galuzin Republik Indonesia, P. Yusjantoro, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Panglima

Angkatan Darat, Angkatan Udara dan Angkatan Laut, perwakilan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan personel TNI AU, 30 ahli yang bertanggung jawab SC "Teknologi Rusia" Republik Indonesia " kedutaan besar dan kantor perwakilan.

Kerjasama Indonesia-Rusia Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2018) Kebijakan Politik

Meskipun situasi keamanan domestik dan regional Indonesia relatif stabil, namun Indonesia perlu lebih memodernisasi alutsista dan peralatan tempurnya sejalan dengan perkembangan saat ini. Namun, pemerintah sendiri terkendala minimnya anggaran untuk mengimpor peralatan tempur dari luar negeri. Tinjauan anggaran Indonesia akan memungkinkan negara tetangga Indonesia, Malaysia dan Singapura, untuk lebih memodernisasi peralatan tempur mereka. Sebagai contoh modernisasi tank bergerak, Malaysia saat ini memiliki 48 tank PT-91 dari Polandia. (Ozili, 2022)

Selain itu, Singapura saat ini memiliki 96 tank Leopard buatan Jerman, yang kemampuan tempurnya sebanding dengan MBT M1A2 Abrams buatan AS. Indonesia sendiri belum pernah merasakan kendaraan tempur dengan senjata kaliber lebih besar dari 105 mm. Namun kenyataannya, Indonesia berupaya melakukan lompatan teknologi sebanyak-banyaknya, dan selain pengadaan beberapa tank dari Pindad, lembaga litbang dan universitas nasional juga banyak melakukan pengadaan tank lainnya.

Politik luar negeri adalah kebijakan suatu negara dalam mengatur hubungannya dengan negara lain di dunia internasional. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri secara alami berbeda-beda tergantung pada tujuan nasional masing-masing negara. Politik luar negeri Indonesia bersifat bebas dan aktif. Bebas artinya negara Indonesia tidak memihak pada blok kekuatan manapun di dunia. Proaktif artinya negara Indonesia selalu terlibat aktif dalam penyelesaian permasalahan internasional. Berdasarkan politik luar negeri yang bebas aktif, negara Indonesia berhak menentukan arah, sikap, dan cita-citanya sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. (Hutabarat, 2022)

Politik luar negeri suatu negara dapat berubah pada masa pemerintahan presiden atau kepala negara yang sedang memerintah negara tersebut. Tidak terkecuali kebijakan luar negeri Indonesia, dan terus berubah dari pemerintahan Suharto hingga Presiden Joko Widodo. Saat ini Indonesia dipimpin oleh Presiden Joko Widodo yang bertekad menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan berdaya saing dengan semangat baru. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Departemen Luar Negeri 2015-2019. Politik luar negeri Indonesia dalam lima tahun ke depan akan memosisikan Indonesia sebagai kekuatan global dengan mengedepankan identitas kepulauan dalam melakukan diplomasi dan membangun kerja sama internasional, serta secara selektif memperluas mandala partisipasi regional sebuah kekuatan regional. (Maiwan, 2018)

Pada Indonesia Trade Expo 2017 di Rusia, Indonesia menjual minyak sawit dan kopi senilai \$50 juta, 25 kontainer kopi Kapal Api senilai \$850.000, dan 12 kontainer kopi Malang sangrai senilai \$1,2 juta. Berhasil menyelesaikan transaksi komersial dengan Rusia menggunakan kontainer .per tahun. Indonesia juga terlibat aktif dalam pengiriman pasukan

penjaga perdamaian. Sebanyak 2.695 pasukan penjaga perdamaian merupakan personel TNI/Pol dan berpartisipasi dalam sembilan misi penjaga perdamaian global. (Orhan, 2022)

Faktor-Faktor dalam Kebijakan Politik Luar Negeri

William D Coplin mengelompokkan kedalam tiga hal yang berkaitan dengan factor psikologis yaitu penetapan situasi, pemilihan tujuan, pencaharian alternative dan pemilihan alternatif. (Muhammad Afdhal, 2020)

1. Penetapan Situasi (Defening Situation)

Berkaitan dengan konsep citra (image) untuk menganalisis variable psikologis serta pengalaman-pengalaman pribadi (personal experience) sangat mempengaruhi cara seseorang menetapkan lingkungannya yang pada akhirnya mempengaruhi orang tersebut untuk berperilaku. Bisa juga dikatakan sebagai rangkaian yang disebut sebagai citra terbuka dan citra tertutup.

2. Pemilihan Tujuan (Selecting Goals)

Pemilihan tujuan berdasarkan suatu anggapan bahwa pembuatan keputusan adalah merupakan suatu proses intelektual rasional, maka tujuannya secara eksplisit dan hirarkis dapat dirumuskan sebagai peluang yang diberikan oleh lingkungan. Meskipun lingkungan (internasional) akan mempersulit pembuatan pernyataan yang tegas dan jelas dan penyusunan tujuan-tujuan, pembuat keputusan atau kebijakan politik luar negeri yang rasional dan berupaya melakukannya secara maksimal. Jadi kecenderungan seorang pemimpin politik untuk memelihara dan memperbaiki posisi politiknya (dalam negerinya) akan membawa konsekuensi yang jelas dalam penetapan tujuan politik luar negeri. Kebutuhan para pembuat keputusan politik luar negeri akan kekuasaan dan prestasi memang mempengaruhi penekanan akan ancaman terhadap keamanan nasional yang sering dibuat oleh para pemimpin dari berbagai negara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini, yakni Pertama, kami mengumpulkan data melalui analisis dokumen. Dokumen terkait antara lain dokumen resmi perjanjian antara Indonesia dan Rusia, laporan kegiatan terkait implementasi perjanjian, dan publikasi resmi pemerintah yang memaparkan pencapaian dan tantangan dalam implementasi kerja sama bilateral tersebut. Analisis dokumen membantu menilai sejauh mana tujuan perjanjian telah tercapai dan faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan perjanjian.

Kedua, kajian ini memperdalam pemahaman kita mengenai penerapan konkrit kerja sama ekonomi dan teknis kedua negara berdasarkan studi kasus. Studi kasus ini berfokus pada proyek-proyek spesifik yang dimulai atau dipengaruhi oleh perjanjian bilateral, seperti: Pembangunan infrastruktur, kerjasama teknis atau investasi bersama. Penelitian ini mampu menggambarkan berbagai aspek kerja sama bilateral dalam situasi nyata dengan memilih studi kasus yang representatif.

Ketiga, analisis data dilakukan dengan membandingkan hasil aktual dengan target yang ditetapkan dalam kontrak. Pendekatan ini mengidentifikasi pola dan tren dalam implementasi perjanjian dan faktor-faktor utama yang mempengaruhi hasil. Analisisnya juga mempertimbangkan perspektif berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam kerja sama ini, antara lain pemerintah, swasta, dan masyarakat umum. Keempat, kajian ini

menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan dan mengembangkan lebih lanjut kerja sama bilateral ini di masa depan.

Kelima, penelitian ini juga akan memperhatikan konteks politik, ekonomi, dan sosial lebih luas yang dapat mempengaruhi implementasi perjanjian bilateral ini. Hal ini mencakup faktor-faktor seperti perubahan kebijakan dalam kedua negara, dinamika pasar global, dan kondisi ekonomi regional yang dapat memengaruhi kolaborasi ekonomi dan teknis antara Indonesia dan Rusia. Keenam, pendekatan triangulasi akan digunakan untuk memvalidasi temuan dari analisis dokumen dan studi kasus. Dengan menggunakan metode ini, data dari sumber-sumber yang berbeda akan diselaraskan untuk memastikan konsistensi dan keandalan hasil penelitian.

Rekomendasi ini didasarkan pada analisis data dan wawasan dari studi kasus serta mengidentifikasi peluang untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan teknis jangka panjang antara Indonesia dan Rusia. Dengan mengintegrasikan pendekatan kualitatif dan fokus pada dokumen dan studi kasus, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pemahaman dan efektivitas perjanjian bilateral mengenai kerja sama ekonomi dan teknis antara Indonesia dan Rusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isi Perjanjian

Adapun isi Perjanjian tersebut ialah :

- Keinginan untuk perluasan dan peningkatan hubungan bilateral yang berkelanjutan dalam jangka panjang di bidang ekonomi dan teknologi.
- Kami percaya bahwa kerja sama yang berkelanjutan dan efektif diperlukan demi kepentingan kedua negara.
- Menegaskan keinginannya untuk memperkuat kerja sama kedua negara.
- Didorong oleh keinginan untuk memperkuat hubungan persahabatan yang telah ada guna mendorong ekspansi ekonomi dan teknologi kedua negara, berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan yang saling menguntungkan dan menghormati kedaulatan.

Dalam dunia internasional, perjanjian internasional mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan hubungan antar bangsa. Pada hakikatnya sumber utama hukum internasional adalah dokumen-dokumen hukum yang memperhatikan keinginan dan kesepakatan antar negara. Lebih dari 73 tahun telah berlalu sejak hubungan diplomatik kedua negara terjalin. Kerja sama kedua negara berkembang secara dinamis di banyak bidang, seperti yang terlihat pada stadion utama Gelora Bung Karno dan RS Persahabatan.

Indonesia Rusia merupakan anggota G20 sehingga kedua negara mempunyai kepentingan untuk berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi global. Perjanjian internasional ini mengikat Indonesia dan Rusia (prinsip *Pacta Sunt Servanda*) dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perjanjian sesuai peraturan dan perundang-undangan nasional. Perjanjian apa pun akan berlaku bagi Negara-negara ini dan dilakukan dengan itikad baik atau dengan itikad baik (prinsip umum hukum) Pasal 2 Piagam PBB, yaitu,

semua Negara harus memenuhi dengan itikad baik kewajiban mereka berdasarkan Piagam PBB.”

Setelah suatu perjanjian hukum terbentuk, maka lembaga eksekutif wajib melaksanakannya menurut ketentuan umum. Oleh karena itu, kontrak tersebut tidak dapat berlaku surut. Pasal 28 Konvensi Wina 1969 juga menegaskan prinsip non-retroaktif Konvensi dan berlaku di wilayah negara ini. Kesalahan mengenai unsur-unsur penting atau prinsip-prinsip dasar perjanjian Berakhirnya jangka waktu utama perjanjian Menurut Pasal 54a Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian, pengakhiran perjanjian atau penarikan diri suatu negara dapat terjadi jika: Berdasarkan Pasal 54a Konvensi Hukum Wina, ketentuan perjanjian itu sendiri mulai berlaku Rusia, yang sangat maju di bidang teknologi militer dan pernah menjadi salah satu negara adidaya di dunia, juga tertarik.

Hubungan dengan Rusia terbangun dalam kerja sama ekonomi bilateral Indonesia, termasuk perdagangan pembelian peralatan militer. Menjaga keutuhan wilayah dan keamanan negara memerlukan peralatan militer yang kuat dan kuat, dan realisasinya melibatkan seluruh sumber daya nasional, dan mulai tahun 1960-an, negara tersebut membeli senjata dari Rusia (saat itu Uni Soviet). Saat itu, Presiden Sukarno sedang membeli peralatan militer besar dari Uni Soviet. Membeli peralatan militer dari Rusia adalah keputusan yang rasional, karena industri strategis dalam negeri tidak mampu memenuhi permintaan peralatan dan teknologi militer yang lengkap.

Ada beberapa alasan Indonesia memilih Rusia sebagai produsen senjata militer:

- Sejarah hubungan militer Indonesia dan Rusia
- Persyaratan kerja sama militer dari Rusia lebih mudah
- Rusia Bahan baku yang dimiliki Indonesia yaitu lebih fleksibel dalam hal harga yang dibayar Rusia
- Rusia memiliki teknologi militer yang setara dengan Eropa dan Amerika.

Rusia memiliki kekuatan infanteri yang unggul dan Indonesia dapat memperkenalkan sistem militer melalui kerja sama saat ini. Kerja sama dengan Rusia tidak hanya sebatas kerja sama, tetapi juga mencakup pembelajaran dan penggabungan pengetahuan teknis dari Rusia.

Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 1999 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama Teknik dan Ekonomi. Pada Pasal 4 dari delapan pasal yang tercantum dalam perjanjian, para pihak sepakat untuk membentuk Komite Bersama Indonesia-Rusia untuk Kerjasama Ekonomi, Teknik, dan Perdagangan.

Komite Gabungan Perjanjian ini akan mengawasi pelaksanaan Perjanjian ini. Perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Rusia. Komite Bersama akan membuat rekomendasi yang diperlukan untuk melaksanakan isi Konvensi memulai Operasi Tricora untuk membebaskan bagian barat Irlandia dari pendudukan Belanda.

- a. Pelaksanaan Perjanjian
- b. Batal atau Berakhirnya suatu perjanjian itu disebabkan adalah bentuk perjanjian itu bertentangan dengan ketentuan Hukum Nasional.
- c. Perdagangan Alustista dengan Rusia

Mengutip dari data Kementerian Pertahanan Indonesia saat ini memiliki 16 sukhoi SU-27 dan SU-30 pembelian di masa reformasi, pertama kali dilakukan pada 2023 sebanyak 2 unit SU-27 dan 2 unit SU-30. Terakhir Indonesia membeli 6 unit Sukhoi SU-30 pada 2012. Selain jet tempur, Rusia menjual mesin berbagai jenis alustista nilai ekspor pada rentang 2016 sampai 2020 adalah sebagai berikut : (Emanuel Sani de Ornay, 2022)

- Mesin Kendaraan Militer (USD 3,7 miliar)
- Milisi (USD 3,6 miliar)
- Kendaraan Militer (USD 2,8 miliar)
- Artileri Pertahanan Udara (USD 2 miliar)
- Kapal Laut dan Kapal Selam (USD1,5 miliar)

Setelah suatu perjanjian hukum terbentuk, maka lembaga eksekutif wajib melaksanakannya menurut ketentuan umum. Oleh karena itu, kontrak tersebut tidak dapat berlaku surut. Pasal 28 Konvensi Wina 1969 juga menegaskan prinsip non-retroaktif Konvensi dan berlaku di wilayah negara ini. Kesalahan mengenai unsur-unsur penting atau prinsip-prinsip dasar perjanjian Berakhirnya jangka waktu utama perjanjian .

Menurut Pasal 54a Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian, pengakhiran perjanjian atau penarikan diri suatu negara dapat terjadi jika: (Emanuel Sani de Ornay, 2022)

- Berdasarkan Pasal 54a Konvensi Hukum Wina, ketentuan perjanjian itu sendiri mulai berlaku Rusia, yang sangat maju di bidang teknologi militer dan pernah menjadi salah satu negara adidaya di dunia, juga tertarik. Hubungan dengan Rusia terbangun dalam kerja sama ekonomi bilateral Indonesia, termasuk perdagangan pembelian peralatan militer.
- Menjaga keutuhan wilayah dan keamanan negara memerlukan peralatan militer yang kuat dan kuat, dan realisasinya melibatkan seluruh sumber daya nasional, dan mulai tahun 1960-an, negara tersebut membeli senjata dari Rusia (saat itu Uni Soviet). Saat itu, Presiden Sukarno sedang membeli peralatan militer besar dari Uni Soviet.
- Membeli peralatan militer dari Rusia adalah keputusan yang rasional, karena industri strategis dalam negeri tidak mampu memenuhi permintaan peralatan dan teknologi militer yang lengkap.

Ada beberapa alasan Indonesia memilih Rusia sebagai produsen senjata militer:

- Sejarah hubungan militer Indonesia dan Rusia
- Persyaratan kerja sama militer dari Rusia lebih mudah
- Rusia Bahan baku yang dimiliki Indonesia yaitu lebih fleksibel dalam hal harga yang dibayar Rusia
- Rusia memiliki teknologi militer yang setara dengan Eropa dan Amerika. Rusia memiliki kekuatan infanteri yang unggul dan Indonesia dapat memperkenalkan sistem militer melalui kerja sama saat ini.

Kerja sama dengan Rusia tidak hanya sebatas kerja sama, tetapi juga mencakup pembelajaran dan penggabungan pengetahuan teknis dari Rusia. Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 1999 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama Teknik dan Ekonomi. Pada Pasal 4 dari delapan pasal yang tercantum dalam perjanjian, para pihak sepakat untuk membentuk Komite

Bersama Indonesia-Rusia untuk Kerjasama Ekonomi, Teknik, dan Perdagangan. Komite Gabungan Perjanjian ini bertujuan mengawasi pelaksanaan Perjanjian ini serta membantu membebaskan bagian barat Irlandia dari pendudukan Belanda.

KESIMPULAN

Kerjasama ekonomi internasional (Rusia) adalah hubungan antar negara di bidang ekonomi, yang dilakukan melalui perjanjian-perjanjian tertentu dan sesuai dengan prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Penyebab terjadinya pertukaran alat produksi dan faktor produksi adalah perbedaan sumber daya alam, iklim, dan kesuburan tanah. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi, perbedaan ideologi. Kami akan mendorong kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang strategis dan menciptakan inovasi dan produk baru yang bermanfaat bagi kedua negara, serta berupaya menghilangkan hambatan perdagangan seperti tarif dan menyederhanakan prosedur perdagangan. Memprioritaskan proyek infrastruktur yang bersifat strategis dan berdampak signifikan terhadap perekonomian kedua negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arry Bainus, J. B. (2018). Editorial: Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional. *Intermestic: Journal of International Studies*.
- Dano, D. (2023). *Ekonomi Perang: Memahami Konflik Rusia-Ukraina Dari Sudut Pandang Ekonomi*. Lombok: Pusat Pengembangan dan Penelitian Indonesia. .
- Emanuel Sani de Ornay, N. A. (2022). Kepentingan Keamanan Nasional Rusia Dalam Serangan Militer Terhadap Ukraina Tahun 2022. . . *Jurnal Communitarian*.
- Hutabarat, G. F. (2022). Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pasca Perang Rusia-Ukraina Berdasarkan Perspektif National Interest. . *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 162.
- Juliet Kaarbo, J. L. (2020). *Ekonomi Internasional*. . Jakarta: Kencana.
- Maiwan, M. (2018). Teori-Teori Ekonomi Politik Internasional Dalam Perbincangan: Aliran dan Pandangan. . *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 110. .
- Mas'oeed, M. (2020). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. . Jakarta: LP3ES. Moleong.
- Muhammad Afdhal, I. B. (2020). Dampak Invasi Terhadap Reaksi Pasar Pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Indonesia. *Jurnal Akun Nabelo*, 834.
- Orhan, E. (2022). The Effects of the Russia - Ukraine War on Global Trade. *Journal of International Trade, Logistics and Law*. .
- Ozili, P. K. (2022). Global Economic Consequence of Russian Invasion of Ukraine. . *Social Science Research Network*. .
- Wasis Susetio, I. J. (2020). Perang Rusia-Ukraina: Mencari Keseimbangan Dunia Baru. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*.